

**RENJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

DAFTAR ISI

DAFRAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN..	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH	12
BAB IV. PENUTUP.....	14
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang , kami mengucapkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga pembuatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, ini merupakan penjabaran serta perumusan komponen yang terdapat di RENSTRA Dinas Perpustakaan dan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023. Sehingga dapat dijadikan acuan ke dalam program dan rencana kegiatan yang telah disusun serta dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai.

Dengan demikian, diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mendukung pencapaian Visi,misi dan program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023.

Tembilahan, September 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Ir. H/T. EDDY EFRIZAL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 199003 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Renja-PD merupakan suatu dokumen perencanaan instansi yang didalamnya mencerminkan suatu proses yang berorientasi dengan transparansi, partisipasi, akuntabilitas yang diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik.

Dalam hal kendala dan hambatan yang ada maupun yang muncul dalam pelaksanaannya menjadi instrument penting untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan prima dalam perumusan Perubahan Renja-PD.

Dalam Perubahan Renja-PD dijelaskan mengenai proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen Renstra-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Dinas Perpustakaan dan Arsip di Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu potensi bagi pembangunan Daerah disamping sector lainnya dan juga merupakan sumber referensi dan informasi menuju masyarakat pembelajar (Learning Society).

1.2. Landasan Hukum

- a. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- m. Perbub Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir;
- n. Perbub Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2021 Tentang RKPD Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud.

Tujuan Penyusunan Perubahan Renja-PD Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

1. Tercapainya kesamaan arah secara sinergis dan terpadu dari berbagai unsur kepentingan sehingga hasil yang didapat lebih efektif dan efisien.
2. Guna menjamin konsisten di perencanaan, pemilihan dan penetapan program untuk jangka waktu tertentu yang menjadi prioritas Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah maka disusun Rencana Strategis Instansi.
3. Guna menjaga kesinambungan dan keterpaduan program dengan Instansi terkait termasuk didalamnya kelompok masyarakat sehingga Perubahan Renja-PD yang disusun dan dilaksanakan dapat dipakai sebagai alat ukur kinerja serta dapat digunakan sebagai alat kontrol pencapaian visi dan misi.

Tujuan.

Penyusunan Perubahan Renja-PD dimaksudkan untuk menyusun rumusan kondisi Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah kepada masyarakat baik dari segi kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana yang diinginkan pada tahun 2022 guna mengkondisikan masyarakat menuju masyarakat pembelajar.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja-PD terdiri dari V BAB, yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.5 Latar Belakang
- 1.6 Landasan Hukum
- 1.7 Maksud dan Tujuan
- 1.8 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja diakhir tahun melakukan evaluasi Perubahan Renja-PD menilai mengenai apa yang sudah dan telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja-PD pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja-PD Tahun 2022 pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, memuat beberapa point diantaranya :

1. Sasaran : Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.
Indikator : - Tersedianya gedung perpustakaan yang respresentatif
2. Sasaran : - Menambah jumlah buku yang lebih berkualitas
Indikator :
: Meningkatkan kualitas pengelolaan Arsip Daerah SKPD
- Tersedianya tenaga yang profesional
- Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan arsip

Walau demikian dan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

Secara detail realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2022 dan perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan pada Tabel 2.1.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir keadaan lima tahun yang lalu

Adapun Rencana Kerja dengan Program Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tersebut dibawah ini :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - b. Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka

2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

C. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
 - b. Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
 - c. Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

Dengan pelayanan yang didukung personil sebanyak 22 orang PNS dan tenaga honorer sebanyak 59 orang beserta Unit Layanan Perpustakaan di 12 Kecamatan yang sudah terbentuk telah berjalan cukup baik namun masih dirasakan belum terlaksana pelayanan secara maksimal, baik dan memuaskan dengan beberapa hambatan seperti :

1. Terbatasnya Anggaran APBD untuk menunjang tugas pelayanan Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan Pelayanan prima yang berbasis IT.
2. Kondisi Sarana dan Prasarana gedung yang belum memadai (representatif).
3. Masih Kurangnya tenaga professional dibidang Perpustakaan dan Arsip Daerah baik PNS maupun Honorer.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya antara lain :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana Perpustakaan dan Kearsipan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
2. Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang Perpustakaan dan Kearsipan serta perbandingan SDM dan beban kerja yang kurang proporsional;
3. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan bahan pustaka yang baru dan pengadaan peralatan dan kelengkapan arsip;
4. Masih rendahnya minat baca masyarakat yang disebabkan oleh rendahnya kegemaran membaca masyarakat.

5. Lemahnya koordinasi, evaluasi, pembinaan dan pelaporan;
6. Lemahnya sinkronisasi antar SKPD dalam rangka mendapatkan duplikasi arsip sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
7. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyerahan dokumen/arsip bernilai sejarah yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi pentingnya arsip bernilai sejarah.

Dalam kurun waktu dua tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif (Participatory planning), bahwa perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting untuk mendukung pendidikan seumur hidup (long life education) menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan dan pembangunan kearsipan modern yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus, yang diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).

Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa strategi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan) yang profesional dan terampil pada semua sektor dan lini akan mendukung terwujudnya pelayanan prima di bidang perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan akan dapat meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat di bidang perpustakaan dan kearsipan;

3. Meningkatkan jumlah dan jenis koleksi perpustakaan akan dapat mendukung terwujudnya pengembangan minat dan budaya baca masyarakat serta pengembangan fasilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan bersinergi dengan stake holder lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir berupa sosialisasi/penyuluhan dan pelaksanaan berbagai pembinaan/keterampilan yang mengajarkan masyarakat mandiri dan sejahtera;
5. Pembinaan dan pelatihan yang terus menerus sehingga terpenuhi tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan yang memadai;
6. Peningkatan penyelenggaraan kearsipan di seluruh Perangkat Daerah/ Pemerintahan Desa melalui pengawasan, sosialisasi, supervisi, pembinaan, monitoring, audit dan evaluasi akan mendukung terwujudnya good governance dan clean governance (penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih) di Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun program, kegiatan, indikator, kelompok sasaran, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana dijelaskan secara terperinci lampiran Tabel 3.1

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 adalah merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan perangkat Daerah. Dengan Perubahan Renja ini diharapkan Pimpinan OPD akan menentukan langkah yang berupa kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir akan lebih terarah. Renja ini disusun berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif sebagai bahan acuan dan penilaian serta mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan indikasi penggunaan dana sesuai dengan rencana stategis OPD belum mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah, sehingga memungkinkan adanya perubahan berkenaan dengan ketersediaan anggaran tahun berkenaan.

Demikian penyusunan dokumen perencanaan ini dipergunakan sebagai pedoman operasional untuk menjaga konsistensi, kesinambungan dan sinergi. Untuk mengantisipasi potensi perubahan dan perkembangan yang sangat cepat, tidak menutup kemungkinan adanya penyempurnaan.

Tembilahan, September 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Ir. H. T. EDDY EFRIZAL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 199003 1 006

Tabel 3.1.
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KODE RKPD/RENSTRA	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN 2021	SATUAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
						RKPD 2022 MURNI	RKPD PERUBAHAN 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					5.497.034.926	5.087.327.926
2	23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.340.241.626	4.950.133.376
2	23 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rata-rata nilai aspek perencanaan kinerja dan Pelaporan Kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah		Nilai	22	4.420.526.626	4.528.275.376
2	23 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja yang disusun Sesuai standar		Persen	100	55.106.000	52.866.000
2	23 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD yang disusun		Dokumen	3	55.106.000	52.866.000
2	23 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar		Persen	100	2.608.064.926	2.608.064.926
2	23 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan		Orang	26	2.608.064.926	2.608.064.926
2	23 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik		Persen	100	628.419.700	741.658.450
2	23 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan yang disediakan		Jenis	11	1.500.000	1.500.000
2	23 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Jenis	15	89.177.000	39.274.250
2	23 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Jenis	3	39.990.450	44.869.950
2	23 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		Jenis	8	61.370.250	61.370.250

2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan		Eksemplar	2500	239.600.000	370.500.000
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan		Kali	41	196.782.000	224.144.000
2	23	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor		Persen	100	1.084.936.000	1.086.686.000
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan kebutuhan surat menyurat		Persen	100	2.000.000	3.750.000
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayarkan		Rekening	4	544.536.000	544.536.000
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelaksana yang dibayarkan		Orang	58	538.400.000	538.400.000
2	23	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik		Persen	100	44.000.000	39.000.000
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Lapangan yang dipelihara			14	40.000.000	35.000.000
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		Unit	15	4.000.000	4.000.000
2	23	2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Jumlah bahan bacaan perpustakaan		Persen	70	919.715.000	421.858.000
2	23	2	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelengkapan bahan bacaan perpustakaan		Persen	70	916.415.000	421.858.000
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Pendidikan Dasar yang dibina		Madrasah	40	135.000.000	85.142.000
2	23	2	2.01	5	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan khusus yang dibina		khusus	7	1.885.000	1.885.000
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengunjung Perpustakaan yang dilayani		Orang	65000	772.230.000	324.231.000
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Koleksi buku Perpustakaan yang disediakan		Eksamplar	1000	7.300.000	10.600.000

2	23	2	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Baca dan Literasi yang dilaksanakan		Persen	100	3.300.000	-
2	23	2	2.02	1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah peserta Didik yang diikuti		Orang	60	3.300.000	-
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					156.793.300	137.194.550
2	24	2			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase arsip daerah yang disimpan dan dilestarikan pada LKD		Persen	100	156.793.300	137.194.550
2	24	2	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Arsip Dinamis yang terpelihara		Persentase	100	156.793.300	137.194.550
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah SDM Pengelola Arsip yang dilatih		OPD	25	84.293.750	79.220.000
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip daerah yang dipelihara		Dokumen	500	19.999.550	14.349.550
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang diaudit dan dibina		OPD	55	52.500.000	43.625.000